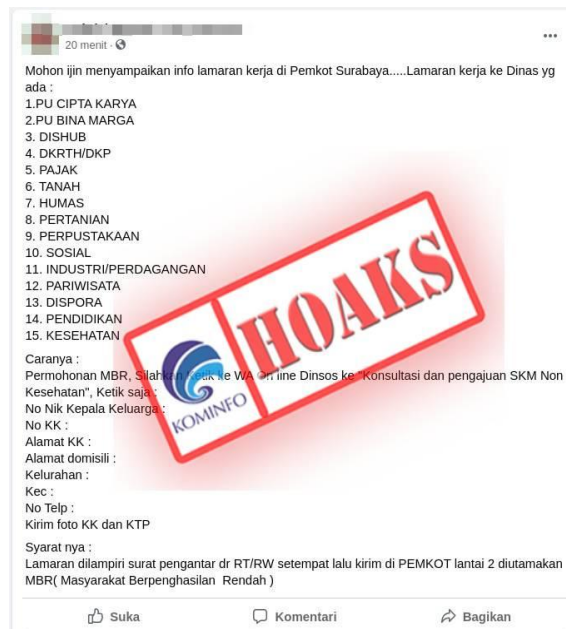


Sabtu, 20 Maret 2021

1. [HOAKS] Lowongan Pekerjaan Khusus Warga yang Memiliki KTP Surabaya



Penjelasan:

Beredar informasi melalui media sosial Facebook dan WhatsApp yang mengatasnamakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait adanya lowongan pekerjaan khusus warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surabaya. Dalam informasi yang beredar disebutkan, salah satu syarat rekrutmen tersebut adalah surat lamaran harus dilampiri surat pengantar RT/RW setempat dan diutamakan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Faktanya, Humas Pemkot Surabaya melalui laman Twitter resminya @BanggaSurabaya menyatakan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Pihaknya menegaskan, hingga saat ini, Pemkot Surabaya masih melakukan pendataan kepada setiap warga yang tergolong MBR. Dilansir dari laman [kompas.com](https://www.kompas.com), Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajataro juga menyebutkan pendataan MBR kali ini lebih rinci dibandingkan data yang lama. Sebab, petugas tidak hanya melihat kondisi rumah warga, namun juga memperhatikan jumlah orang yang bekerja dan tempat bekerja dalam satu KK, termasuk jumlah pendapatannya dalam satu bulan.

Hoaks

Link Counter:

- <https://twitter.com/BanggaSurabaya/status/1372772414719856640>
- <https://twitter.com/SapawargaSby/status/1372796510325284867>
- <https://regional.kompas.com/read/2021/03/19/163640678/beredar-pesan-berantai-rekrutmen-pekerjaan-untuk-warga-surabaya-pemkot>
- <https://surabaya.liputan6.com/read/4510567/pemkot-broadcast-rekrutmen-pekerjaan-khusus-warga-ktp-surabaya-hoaks>

Sabtu, 20 Maret 2021

2. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan Bareskrim Kota Bekasi Melakukan Panggilan Pemeriksaan



Penjelasan:

Telah beredar akun Instagram mengatasnamakan Bareskrim Kota Bekasi. Akun tersebut tampak mengirimkan pesan melalui *direct message* kepada seorang warganet untuk bertemu di Polres Metro Bekasi Kota dan mengatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebuah kasus atas nama warganet itu telah diterima pihaknya.

Menanggapi hal itu, Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kopol Erna Ruswing Andari mengatakan akun tersebut bukan akun resmi Polres Metro Bekasi Kota. Ia menuturkan bahwa pihak kepolisian tidak mungkin melakukan pemanggilan melalui media sosial. Adapun menurut Erna proses pemanggilan seseorang dalam rangka pemeriksaan kasus, dilakukan secara resmi menggunakan surat panggilan dengan kop surat Polres Metro Bekasi Kota.

Hoaks

Link Counter:

- <https://bekaci.suara.com/read/2021/03/19/105328/polres-metro-bekasi-kota-tak-pernah-melakukan-pemanggilan-via-medsos?page=1>
- <https://wartakota.tribunnews.com/2021/03/19/viral-akun-bareskrimkotabekasi-ngaku-polisi-kasubag-humas-polres-metro-bekasi-kota-hoaks>

Sabtu, 20 Maret 2021

3. [HOAKS] Pengumuman Vaksinasi Covid-19 untuk Semua Warga di Puskesmas Kramat Jati



Penjelasan:

Beredar sebuah pesan berantai melalui WhatsApp yang menginformasikan adanya vaksinasi Covid-19 untuk lansia dan bukan lansia di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati dengan hanya membawa e-KTP asli.

Dilansir dari data.jakarta.go.id, berdasarkan klarifikasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Tim Jalahoaks, diketahui bahwa Puskesmas Kecamatan Kramat Jati tidak pernah mengeluarkan pengumuman tersebut. Adapun nomor hotline Puskesmas Kecamatan Kramat Jati dapat dihubungi melalui nomor 0895321748470.

Hoaks

Link Counter:

- <https://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/HOAKS-Pengumuman-Vaksin-Covid-19-Untuk-Semua-Warga-di-Puskesmas-Kecamatan-Kramat-Jati>

Laporan Isu Hoaks

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



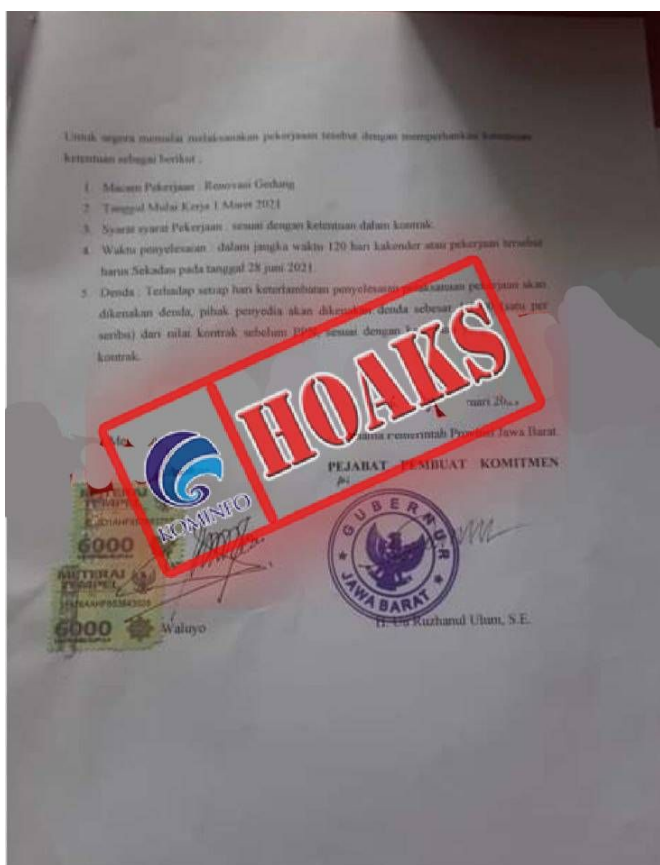
Sabtu, 20 Maret 2021

4. [HOAKS] Surat Edaran Proyek yang Ditandatangani oleh Wagub Jabar Selaku PPK

Penjelasan:

Telah beredar sebuah surat edaran terkait proyek yang ditandatangani oleh Wagub Jabar selaku Pejabat Pembuat komitmen atau PPK.

Faktanya, menurut Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa surat edaran tersebut tidak benar atau hoaks. Dalam akun instagramnya, Uu menegaskan, Gubernur maupun Wakil Gubernur secara hukum tidak berhak menandatangani hal tersebut dan bukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pemalsuan tanda tangan untuk dokumen merupakan sebuah pidana. Uu juga mengajak netizen untuk bijaksana dan tidak cepat percaya akan adanya kegiatan yang mengatasnamakan dirinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.



Hoaks

Link Counter:

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=786749482259640&id=186726692261925
- <https://www.instagram.com/p/CMimiswnR8g/?igshid=1eg3sl5br5p0h>
- <https://www.instagram.com/p/CMi8Ax8rlgK/?igshid=zrfmo1vto205>